



## Seminar Nasional Keinsinyuran (SNIP)

Alamat Prosiding: snip.eng.unila.ac.id



### Kebijakan Penataan Permukiman Kumuh Pada Kampung Kota Di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung

S Maisyaroh<sup>a,\*</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Program Profesi Insinyur, Fakultas Teknik, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145

#### INFORMASI ARTIKEL

#### ABSTRAK

##### Riwayat artikel:

Diterima 30 Agustus 2021  
Direvisi 18 November 2021  
Diterbitkan 24 Desember 2021

##### Kata kunci:

Kebijakan  
Penataan Permukiman Kumuh  
Rencana Tata Ruang

Metropolisasi merupakan fenomena global yang terjadi di setiap kota di dunia dan memiliki ciri-ciri berbeda antara satu kota dengan kota yang lainnya. Begitu juga yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Semenjak merebut kemerdekaannya dari Belanda, Indonesia terus berkembang menjadi negara terpadat populasinya dan menempati urutan kelima di dunia. Konsentrasi populasi terjadi di perkotaan. Kegiatan ekonomi dan lainnya mengundang penduduk untuk menetap di kota. Permasalahan kurangnya permukiman pun timbul sehingga permukiman kumuh mulai tumbuh.

Kebijakan pemerintah tentang penataan permukiman kumuh pun mulai dilaksanakan. Mulai dari Kampung Improvement Program sampai dengan program Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project/NUSSP) dan pembangunan rumah susun. Kota Bandar Lampung yang merupakan ibukota Propinsi Lampung pun memiliki jumlah permukiman kumuh yang cukup banyak, salah satunya adalah kawasan Teluk Betung. Untuk menganalisa kebijakan yang diambil dalam menangani kawasan kumuh di kota ini, akan di bahas kebijakan pemerintah mulai dari Rencana Tata Ruang Propinsi hingga Rencana Detil Tata Ruang Kota Bandar Lampung. Aktor yang berperan dalam menangani permasalahan permukiman kumuh pun dibahas untuk mengetahui langkah aktual dalam perbaikan permukiman kumuh.

#### 1. Pendahuluan

Metropolisasi merupakan suatu aktivitas dinamik spasial yang berfungsi untuk mengorganisasikan kegiatan di seputar kawasan metropolitan. Metropolisasi terbentuk secara klasik dari jaringan periurban dengan merealisasikan prinsip-prinsip aglomerasi, terutama gaya hidup masyarakat perkotaan. Metropolisasi merupakan fenomena global yang terjadi di setiap kota di dunia dan memiliki ciri-ciri berbeda antara satu kota dengan kota yang lainnya.

Indonesia, sebuah negara yang sedang berkembang, juga tidak lepas dari fenomena metropolisasi, yang terjadi sesuai dengan kondisi wilayahnya. Sebagai contoh, ibukota negara, yaitu Jakarta, mengalami proses metropolisasi seperti ibukota negara lainnya.

\*Penulis korespondensi.

E-mail: smasyaroh1456@mail.com

Untuk mengatasi masalah terkonsentrasinya jumlah penduduk di satu wilayah, pemerintah mengadakan program yang dinamakan transmigrasi, program ini memiliki tujuan memindahkan masyarakat dari Jawa, Bali dan Madura menuju

daerah yang jarang penduduknya seperti Sumatra, dan Propinsi Lampung menjadi salah satu daerah tujuan transmigrasi. Sehingga wajar adanya jika kini jumlah penduduknya padat dan masyarakatnya multi etnik. Selain itu, posisi strategis Propinsi Lampung antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra, memungkinkan Lampung untuk menjadi jembatan aktivitas perekonomian antara dua pulau. Karena posisinya juga yang dekat dengan Selat Malaka, Lampung ikut andil dalam kerjasama internasional antara Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Kerjasama ini disebut juga dengan Indonesia-Malaysia-Singapura Growth Triangle (IMS Growth Triangle). Karena keuntungan geografis ini, Lampung, khususnya Bandar Lampung memiliki peluang untuk berkembang menjadi kota metropolitan.

Hingga kini, permasalahan permukiman kumuh tetap menjadi isu hangat. Sejalan dengan kenaikan tingkat kemiskinan, maka jumlah permukiman kumuh pun terus bertambah, selama ini banyak program yang telah diterapkan

untuk menangani masalah permukiman ini, tetapi pada kenyataannya permukiman kumuh tetap saja ada. Kami memilih lokasi studi pada kampung kota Teluk Betung, yang terletak di Kota Bandar Lampung.

Seperti yang telah dibicarakan di atas, maka timbul pertanyaan berikut : Kebijakan publik aktual apa saja yang dilakukan untuk penataan permukiman kumuh pada kampung kota Teluk Betung, Bandar Lampung, dan bagaimana pelaksanaannya ?

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan publik dalam hal penataan permukiman kumuh yang ada di Kota Bandar Lampung, dan lebih terfokus pada kampung yang terletak di Teluk Betung.

### Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis (Despa, 2021) deskriptif dengan cara membandingkan beberapa pendapat, sebelum pada akhirnya diperoleh hasil analisis. Pertama, metode analisis digunakan untuk menjelaskan elemen-elemen (Nama, 2019) dan konteks-konteks yang memungkinkan hingga diperoleh keterangan yang lebih jelas. Kemudian, metode analisis digunakan untuk menjabarkan kajian teori (Sulistiono, 2021) dari berbagai sumber pustaka yang digunakan. Sehingga sedikit demi sedikit, penjelasan tentang penataan permukiman kumuh bisa tergabung dalam penelitian ini.

Sebelum menjawab pertanyaan penelitian, kami akan menyusun pembahasan penelitian yang dimulai dengan menelaah tentang pengertian permukiman kumuh serta fenomenanya pada bagian pertama, kemudian gambaran wilayah studi yaitu kampung yang terletak di Teluk Betung, Kota Bandar Lampung pada bagian keduanya, kemudian pembahasan akan dilanjutkan dengan menganalisis peranan aktor terkait dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah dari tingkat propnsi hingga tingkat di bawahnya, yaitu kota dan pada bab terakhir akan ada kesimpulan hasil penelitian

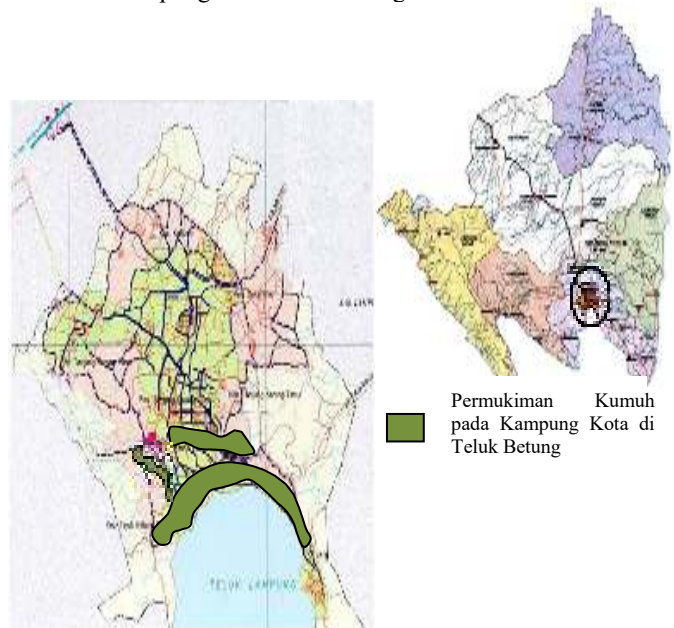
### Kedudukan Teluk Betung Pada Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah Ibu Kota Provinsi Lampung yang memiliki luas 19.218 Ha. Kota Bandar Lampung berada dibagian selatan Provinsi Lampung (Teluk Lampung) dan ujung selatan Pulau Sumatera. Adapun batas-batas kotanya, meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar (Kab. Lampung Selatan)
- Sebelah Selatan dengan Teluk Lampung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang (Kab. Lampung Selatan)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedungtataan dan Padang Cermin (Kab. Lampung Selatan)

Teluk Betung merupakan salah satu kawasan yang terletak di kota Bandar Lampung (Lihat Gambar di bawah), dan merupakan Bagian Wilayah Kota (BWK) yang mencakup wilayah Kecamatan Teluk Betung Utara, Kecamatan Teluk Betung Selatan, dan Kecamatan Teluk Betung Barat. Daerah ini memiliki keistimewaan tersendiri yaitu terletak disuatu teluk yang nyaman dengan keindahan panorama laut dan beberapa gugusan pulau kecil ditengah laut yang potensial dikembangkan untuk wisata rekreasi bahari. Hal ini juga ditunjang oleh letaknya yang tidak jauh dari pusat kota. Keindahan pantai dan Teluk Lampung ini dapat menjadi modal utama bagi Bandar Lampung untuk mengembangkan diri sebagai kota pantai (waterfront city). Tapi, selain memiliki potensi yang

menguntungkan bagi pergerakan perekonomian Bandar Lampung, Teluk Betung memiliki sejumlah masalah perkotaan yang cukup serius, yaitu merupakan kawasan terpadat di Provinsi Lampung dan memiliki kawasan permukiman kumuh yang cukup luas. Berikut sejarah singkat lahirnya permukiman kumuh di kampung kota Teluk Betung.



Berdasarkan data pada tahun 2004 yang dimiliki *Urban Poor Linkage (Uplink)* Lampung, arus kedatangan penduduk yang menetap di daerah Teluk Betung dimulai pada tahun 1957 di Kelurahan Sukaraja, Kelurahan Bumi Waras dan Kelurahan Kangkung. Penghujung tahun 1983, Gubernur Lampung mengeluarkan surat keputusan No. G/155/Bappeda/HK/1983 yang mendelegasikan PT. Bina Bumi Segara (PT. BBS) untuk melakukan reklamasi pantai Teluk Betung (dimulai dari Gunung Kunyit hingga Gudang Garam).

Kemudian pada tahun 1980 hingga 1990, populasi masyarakat pun mulai banyak berdatangan dan menetap di Teluk Betung yang mengakibatkan melonjaknya jumlah penduduk. Tetapi, pada tahun 1991, PT. BBS mengeluarkan surat yang isinya menyatakan bahwa masyarakat harus pindah dari lokasi reklamasi pantai. Pada akhirnya penggusuran tidak dapat dielakkan. PT. BBS memberikan uang ganti rugi mulai Rp. 300.000,00 sampai Rp. 500.000,00 per keluarga.

Setelah penggusuran pada tahun 1991, baik PT. BBS ataupun pemerintah provinsi tidak melakukan apapun atas tanah tersebut. Krisis moneter pada tahun 1997 dan jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, membuat masyarakat yang tadinya meninggalkan pantai Teluk Betung, akhirnya kembali lagi dan membangun rumah tempat tinggal (khususnya di Kelurahan Bumi Waras, Kelurahan Kangkung dan Kelurahan Pesawahan).

Sejak tahun 1998 hingga 2003, pembangunan rumah terus bertambah, tetapi tidak ada tindakan dari PT. BBS dan juga pemerintah provinsi. Tapi, pada tahun 2004, walikota Bandar Lampung, Soeharto (bukan presiden Soeharto) menerbitkan surat No. 2 tahun 2004 tentang peraturan bangunan pinggir air untuk daerah Teluk Betung selatan, Teluk Betung Utara, dan Panjang. Kemudian masyarakat melakukan unjuk rasa atas terbitnya surat yang berisikan penggusuran tersebut.

Kini, Teluk Betung merupakan kawasan dengan kepadatan 149 jiwa/Ha dan menempati lahan dengan luas 2.917,4 Ha. Kondisi budaya yang terdapat pada kawasan ini adalah budaya

etnis Cina dan suku Jawa, karena kebanyakan dari mereka adalah pendatang yang sudah lama menetap di Kota Bandar Lampung. Penduduk etnis cina menetap pada sebagian daerah yang terbilang daerah golongan atas, sedangkan para pendatang tinggal di daerah kumuhnya. Sebagian besar pendatang ini beragama Islam, tetapi tidak ada konflik yang muncul untuk masalah agama. Dengan kondisi sosial yang berbeda-beda, tak jarang terjadi konflik sosial karena kecemburuan tingkat kesejahteraan. Masyarakat jawa dan asli Lampung, menganggap etnis Cina adalah saingan yang harus dijauhkan dari pergaulan. Hal ini menyebabkan timbulnya gap atau jarak yang membuat hubungan sosial kemasyarakatan yang tidak harmonis. Banyak wanita yang berasal dari kampung kumuh Teluk Betung, bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk kegiatan harian para keluarga etnis Cina.

Berdasarkan pengamatan awal, bentuk konstruksi bangunan kawasan Teluk Betung sebagian besar adalah dinding semi permanen. Kemudian pada urutan selanjutnya adalah dinding kayu (papan) dan sangat sedikit sekali dinding konstruksi permanen. Sebagian besar hunian-hunian yang terbentuk memiliki luas bangunan di bawah 36 m<sup>2</sup> dan hanya 15% yang memiliki luas bangunan di atas 70 m<sup>2</sup>.

Sesuatu yang kontroversi terhadap hukum terjadi pada status kepemilikan lahan di kawasan Teluk Betung ini. Sebagian masyarakat hanya memiliki status hak milik. Sedangkan masyarakat yang memiliki kepemilikan lahan bersertifikat hanya sebagian kecil saja. Kebanyakan mereka membangun hunian di atas tanah pemerintah dan lahan yang dilarang untuk di bangun, seperti pada pusat perdagangan, bantaran sungai, dan sempadan pantai. Jumlah masyarakat yang tinggal di bantaran sungai pada kawasan Teluk Betung adalah sebanyak 333 Kepala Keluarga (KK) yang tertampung dalam 208 unit rumah dan yang menetap pada sempadan pantai sebanyak 1.396 unit rumah (Dokumen Rencana Detil Tata Ruang Kota Bandar Lampung, 2005).

Bangunan-bangunan pada kawasan ini memang masih banyak yang bersifat semi permanen dengan dinding setengah terbuat dari batu bata dan setengahnya lagi terbuat dari kayu. Bahkan banyak juga yang seutuhnya dinding terbuat dari kayu (papan) dan bambu (anyaman). Dengan kondisi lahan yang sangat terbatas maka antar bangunan hunian pun tidak memiliki jarak yang sesuai dengan standar yang dipersyaratkan, sehingga kawasan ini menjadi kumuh oleh padatnya bangunan.

Pencapaian yang menjadi syarat kesehatan untuk sirkulasi udara tidak mungkin didapatkan. Bahkan beberapa rumah yang bertetangga hanya dibatasi oleh satu lapis dinding kayu (rumah saling menempel), tentu saja keadaan ini tidak memungkinkan untuk melubangi dinding sebagai alat sirkulasi udara.

Untuk memelihara saluran drainase yang ada di kampung kota Teluk Betung, Pemerintah Kota selalu menyediakan dana tahunan yang ditujukan untuk kampung-kampung kumuh di kawasan Teluk Betung, sehingga kondisi lingkungan sangat bergantung pada pendanaan pemerintah

### Fenomena Permukiman Kumuh Pada Kampung Kota

Kata permukiman kumuh (slum area) menjelaskan lingkungan perumahan yang awalnya berkondisi baik namun kemudian menurun, tidak sesuai dengan standar yang ada, berkepadatan tinggi, dan seringkali dihuni oleh kelompok-kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Sedangkan menurut Arawinda Nawagamuwa dan Nils Viking (2003:5) keadaan kumuh dapat mencerminkan keadaan ekonomi, sosial, budaya para penghuni permukiman tersebut. Adapaun ciri-ciri kawasan kumuh dapat tercermin dari: Penampilan fisik

bangunannya yang miskin konstruksi; yaitu banyaknya bangunan-bangunan temporer yang nampak tak terurus dan tanpa perawatan; Pendapatan yang rendah mencerminkan status ekonomi mereka karena biasanya masyarakat kawasan kumuh berpenghasilan rendah; Kepadatan bangunan yang tinggi, dapat terlihat dari tidak adanya jarak antar bangunan maupun siteplan yang tidak terencana; Kepadatan penduduk yang tinggi dan masyarakatnya yang heterogen; Sistem sanitasi yang miskin atau tidak dalam kondisi yang baik; Kondisi sosial yang tidak baik dapat dilihat dengan banyaknya tindakan kejahatan/kriminal; dan Banyaknya jumlah masyarakat pendatang yang bertempat tinggal dengan menyewa.

Selanjutnya muncul istilah permukiman ilegal. Definisi permukiman ilegal (squatter) adalah daerah perumahan dengan kualitas buruk yang dibangun di atas lahan yang ditempati secara tidak legal, lahan biasanya merupakan milik negara atau lahan milik pribadi yang ditinggalkan oleh pemiliknya.

Kriteria permukiman kumuh di Indonesia, didapatkan atas keadaan yang kadang ditemukan pada beberapa bagian di daerah yang disebut kampung kota, tetapi bukan berarti semua kampung kota merupakan permukiman kumuh. Untuk memahami lebih lanjut tentang definisi kampung kota, beberapa ahli menyebutkan; Kampung merupakan kawasan hunian masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi fisik kurang baik. Kampung merupakan kawasan permukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini disebut 'slum' atau 'squater'. Kampung merupakan lingkungan tradisional khas Indonesia, ditandai ciri kehidupan yang terjalin dalam ikatan kekeluargaan yang erat (Herbasuki, 1984:112); Kampung kotor yang merupakan bentuk permukiman yang unik, tidak dapat disamakan dengan 'slum' dan 'squater' atau juga disamakan dengan permukiman penduduk berpenghasilan rendah.

Kampung bisa juga disebut sebagai bentuk organisasi dari sebuah desa, tetapi kawasan ini terdapat di dalam kota dan berpenghuni padat, masyarakatnya heterogen, yang tidak lagi menjadi pusat dan kutub integrasi sosial dan di kampung kota sudah tidak ada lagi aktivitas-aktivitas pertanian seperti yang ada di desa; dan juga, pengenalan terhadap bahan bangunan merupakan hal yang baru, tetapi perbedaan ini tidak menghilangkan sifat kegotong royongan yang memang sudah ada di dalamnya.

Jadi untuk definisi kampung kota itu sendiri terdapat beberapa perbedaan pendekatan yang digunakan para ahli, sesuai dengan situasi yang ada. Menurut kami, kekumuhan bukan merupakan ciri khas dari suatu kampung kota. Kekumuhan timbul dan terus bertambah seiring dengan waktu dan kekumuhan itu muncul sebagai akibat dari kelemahan kemampuan materi dalam menjalani hidup.

Dari beberapa definisi kampung kota yang telah disebutkan di atas, kami menyimpulkan bahwa kampung kota adalah sebuah bentuk permukiman khas Indonesia yang terletak di tengah-tengah kota dengan kepadatan bangunan yang tinggi dan terbangun tidak teratur di atas tanah legal (artinya tanah tersebut merupakan milik pribadi) atau tanah ilegal (tanah bukan merupakan milik pribadi) tanpa sarana dan prasarana yang memadai, baik dilihat dari segi kuantitas ataupun dari segi kualitas. Di sisi lain, masyarakat penghuni permukiman kumuh di kampung kota disebut juga masyarakat marginal, mereka memiliki nilai kekerabatan yang sangat tinggi, mereka sangat menghargai nilai-nilai solidaritas karena merasa memiliki penderitaan yang sama. Rasa kekeluargaan yang kental ini, biasanya sudah mereka warisi secara turun-temurun. Kebanyakan dari penghuni permukiman ini, adalah masyarakat dari pedesaan yang notabene sangat menjaga rasa kekeluargaan.

Tingkat solidaritas ini mereka bawa ke perkotaan dan terus mereka jaga sehingga menjadi tradisi yang tidak mungkin dihilangkan. Kampung kota memiliki karakteristik seperti:

- Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau tidak memadai
- Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.
- Kampung kota merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup secara tersendiri di tengah kota dengan batas-batas kebudayaan. Kampung kota merupakan suatu bentuk permukiman yang terbangun di atas tanah negara, sehingga dikategorikan sebagai hunian liar (squatter), atau suatu bentuk satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau sebuah RW, atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian liar.
- Penghuni permukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen. Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang beranekaragam, begitu juga asal muasalnya, mereka kebanyakan merupakan pendatang dan mereka sudah lama menetap di daerah tersebut.

#### **Analisis Peran Aktor Dan Rencana Tata Ruang Dalam Penataan Permukiman Kumuh**

Poin yang harus diperhatikan adalah, adanya perubahan program penataan permukiman padat penduduk, dari KIP (Kampung Improvement Program) berubah menjadi pembangunan rumah susun. Pemberhentian KIP dilakukan karena Bank Dunia tidak lagi mendanai program tersebut. Pemerintah pusat tidak lagi menanggarkan dana untuk kelangsungan KIP, tetapi jika pemerintah daerah memiliki dana tersendiri untuk melaksanakan KIP, maka hal tersebut mutlak menjadi hak dari daerah tersebut. Evaluasi jangka pendek atas pelaksanaan KIP mengindikasikan bahwa KIP mampu meningkatkan kualitas lingkungan kualitas kampung, tetapi untuk evaluasi jangka panjang menunjukkan bahwa KIP tidak mampu menjaga kondisi baik lingkungan, kondisi kampung yang telah di-KIP kembali menjadi buruk kualitas lingkungannya. Evaluasi ini didasarkan pada pernyataan di bawah ini;

*While each of the kampungs affected by the KIP had been provided with communal toilet and washing blocks, a high percentage of them were ineffective because of poor maintenance, unreliable water supply and poor location, suggesting that they were becoming "a wasted investment". Consequently, users abandoned them and many kampungs needed to be "re-KIPped"* (Kessides, 1997:A3).

Jadi, bagi kampung kota yang telah dilakukan perbaikan lingkungan dengan KIP, kampung tersebut membutuhkan kembali pelaksanaan program KIP secara terus-menerus untuk menjaga kualitas lingkungan permukiman. Hal ini menunjukkan bahwa KIP tidak berkelanjutan (kampung-kampung selalu bergantung pada program KIP).

Hal lain yang juga menjadi poin penting untuk dipertanyakan adalah status lahan. Secara umum kampung kota terletak di dekat daerah strategis kota, sehingga begitu kualitas lingkungannya membaik, banyak penduduk yang menjual rumahnya. Biasanya penghuni baru merubah fungsi lahan menjadi tempat komersil, bukan lagi sebagai rumah. Terakhir, kekurangan lahan terbangun juga ikut menjadi alasan akan perubahan politik penataan permukiman kumuh menjadi

pembangunan rumah susun. Tetapi perubahan politik ini tidak menunjukkan bahwa rumah susun bukan merupakan satu satunya solusi ideal untuk masyarakat kampung kota. Beredar pendapat umum di masyarakat bahwa tempat bermukim harus selalu berdekatan dengan tanah, hal yang tidak mungkin didapat jika masyarakat menetap pada rumah susun. Kutipan ini didasarkan pada « Construire des grands ensembles n'est pas l'unique solution aux problèmes du logement...A Java, la population a toujours vécu en contact avec le sol ; c'est là pour elle une donnée importante. En outre, nous manquons d'argent... » (Specter, 1984, p.28)

Perubahan politik penataan permukiman kumuh menjadi konstruksi rumah susun merupakan suatu inovasi baru, yang menurut kami, di satu sisi hal ini sudah tidak terelakkan lagi, karena jumlah penduduk perkotaan terus bertambah, tetapi di sisi lain, luasan lahan tidak akan bertambah, sehingga konstruksi vertikal memang dibutuhkan.

Sesuai dengan rencana tata ruang Kota Bandar Lampung, disebutkan akan diadakan Penataan Kawasan Pesisir Bandar Lampung. Konsultan yang ditunjuk untuk menata adalah PT Dann Bintang Galarrancana karena dianggap telah sukses menangani permukiman kumuh di Pantai Losari dengan menata kawasan menjadi waterfront city. Pantai Losari diubah menjadi kawasan permukiman, kawasan wisata, kawasan olahraga serta kawasan komersial. Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kesuksesan yang telah diperoleh PT Dann Bintang Galarrancana dalam menata Pantai Losari, akan berhasil juga dalam menata pantai di Teluk Betung. Rencana ini sebenarnya sangat baik, karena pertama, kawasan Teluk Betung terbebas dari permukiman kumuh dan kedua, pemerintah kota mendapatkan keuntungan dari penataan kawasan pantai ini. Karena tentu saja jika penataan ini berhasil, maka akan banyak investor yang menanamkan modal untuk melakukan usaha. Selain itu akan banyak wisatawan yang akan datang, karena Pantai Teluk Betung memang memiliki pesona alam yang sangat indah. Pemerintah kota Bandar Lampung secara rutin mengadakan acara tahunan, yaitu Festival Krakatau untuk mengenang meletusnya Gunung Krakatau pada tahun 1883. Sejarah besar Krakatau ini juga yang digunakan pemerintah Kota Bandar Lampung untuk mendatangkan turis berwisata di Pantai Teluk Betung.

Pertanyaan yang mungkin timbul: dilihat dari ukuran apakah kita bisa mengatakan bahwa proyek ini mampu mencapai tujuannya? Selain itu jika memang pemerintah berharap mencapai sukses, apakah proyek ini mampu meningkatkan kualitas hidup para penghuni permukiman kumuh?

Pertanyaan ini muncul karena, proyek waterfront city memiliki durasi 10-20 tahun dan membutuhkan dana sebanyak 10 milyar rupiah menurut Prof. Ali Kabul Mahi. Memang benar pendanaan proyek ini menjadi tanggung jawab pemerintah kota, pemerintah provinsi serta pemerintah pusat, tetapi jumlah dana tersebut akan dibagi besarnya setiap tahun, jumlah dana yang dialokasikan untuk proyek ini, tiap tahunnya akan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah untuk mendanai. Dalam hal ini terlihat bahwa, kepastian pendanaan proyek merupakan tanda tanya.

Program waterfront city juga memiliki ambiguitas, dengan tujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh pada kampung kota di Teluk Betung, pemerintah kota Bandar Lampung meniru proyek yang sama dan berhasil, yaitu waterfront city pantai Lossari. Keputusan ini didasarkan karena pemerintah Kota Bandar Lampung menganggap Teluk Betung memiliki karakteristik dan situasi fisik yang sama dengan Lossari. Pemerintah lupa bahwa penataan permukiman kumuh

bukan saja penataan fisik, tetapi juga ada nilai kemanusiaan di dalamnya. Keberagaman budaya menunjukkan bahwa masyarakat Lossari dan masyarakat Teluk Betung tidak memiliki tradisi yang sama, perekonomian yang sama, dan seterusnya.

Sebenarnya wajar saja kalau secara "di atas kertas" ada keserasian dalam penanganan permukiman kumuh di Teluk Betung, karena pertama, rencana tata ruang merupakan rencana yang dibuat oleh badan yang sama, yaitu badan perencanaan daerah, hanya saja dalam tingkat yang berbeda. Kemudian, kedua, penyusunan dokumen rencana tata ruang pada setiap tingkat harus mengacu kepada rencana tata ruang pada tingkat di atasnya, hal ini sesuai dengan peraturan yang tertulis pada pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kota (Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 327/KPTS/M/2002).

Selanjutnya, masalah yang mungkin saja timbul adalah pada tahap pelaksanaan di lapangan. Karena sering sekali ditemui bahwa, pelaksanaan di lapangan tidak semudah seperti yang direncanakan. Memindahkan atau menata permukiman kumuh, bukan semata memindahkan atau menata "benda mati", tetapi ada manusia sebagai makhluk sosial di dalamnya. Mereka memiliki budaya yang sudah lama mereka anut.

Pemerintah Kota Bandar Lampung cukup bersungguh-sungguh dalam menangani permukiman kumuh yang terletak pada kampung kota di Teluk Betung. Hal ini bisa terlihat dari proyek reklamasi pantai yang tertuang dalam rencana detail tata ruang kota. Pemerintah merencanakan memindahkan penduduk kampung pada bangunan rumah susun. Sebenarnya pemerintah provinsi pun pernah memiliki program yang sama, yaitu reklamasi pantai Teluk Betung pada tahun 1983. Semua penduduk kampung yang tergolong kumuh dipindahkan pada rumah susun yang letaknya jauh dari pantai. Tetapi masyarakat ternyata tidak mampu bertahan hidup pada rumah susun tersebut, karena mayoritas dari mereka adalah nelayan. Hasilnya, masyarakat kembali lagi pada permukiman kumuh pinggiran pantai dan hingga kini mereka masih tetap disana.

Saat ini, pemerintah kota merencanakan program yang sama, tetapi ada beberapa perbedaan. Rumah susun akan dibangun di pinggir pantai. Pemerintah memasukkan program penataan permukiman kumuh menjadi satu kesatuan dengan program waterfront city. Pemerintah telah memulai pembangunan waterfront city pada tahun 2006 dengan membangun infrastruktur pada kawasan rencana waterfront dan juga pembangunan watergate.

Bisa terlihat, pemerintah menggabungkan penataan permukiman kumuh dengan program waterfront city adalah bertujuan untuk menggunakan subsidi silang, keuntungan perekonomian yang didapat, digunakan untuk operasional rumah susun. Sehingga dalam jangka panjang, peningkatan kehidupan masyarakat bisa tercapai. Tetapi disaat yang sama, rencana ini menunjukkan adanya konflik kepentingan antar pihak provinsi dan pihak kota. Pada tingkat provinsi, program ditunjukkan hanya untuk peningkatan kualitas masyarakat permukiman kumuh, sedangkan pada tingkat kota, kepentingan lebih dititikberatkan pada peningkatan sektor ekonomi.

Kemudian, untuk menghindari kegagalan reklamasi pantai seperti yang pernah dialami pemerintah provinsi, pemerintah kota melakukan studi banding pada pantai Lossari, Kota Makassar yang telah lebih dahulu melaksanakan program waterfront city dan dinilai sukses.

Pertanyaan besar yang kemudian muncul adalah, tempat tinggal sementara masyarakat pada saat rumah mereka digusur dan kemudian dibangun rumah susun. Pada tahun 1983, sebelum masyarakat digusur, pemerintah terlebih dahulu membangun

rumah susun yang letaknya jauh, sedangkan pada saat ini, tidak begitu. Pemerintah kota baru membangun 1 flat rumah susun dari tiga flat yang direncanakan. Setiap flat akan menampung 94 keluarga, sehingga untuk tiga flat akan mampu menampung 282 keluarga. Sedangkan, menurut data yang terdapat pada RDTR Kota Bandar Lampung, jumlah keluarga yang menghuni permukiman kumuh pinggir pantai adalah sebanyak 1.396 keluarga. Lalu, bagaimana pemerintah memperhitungkan hal ini?

Pemerintah juga telah mengumumkan lewat media, bahwa tidak akan pernah ada penggusuran. Tetapi pada kenyataannya, walaupun memang ada penambahan lahan berkat proyek reklamasi, tetapi melihat peta rencana waterfront city, maka akan ada masyarakat yang tergusur.

Pengambilan langkah ini seharusnya sudah diperhitungkan secara matang sebelumnya. Jika pemerintah konsekuen menata permukiman, mereka seharusnya memiliki solusi tempat tinggal sementara pada saat pekerjaan pembangunan berlangsung, di sisi lain lokasi permukiman sementara ini sebaiknya tidak jauh dari laut, karena sebagian besar mereka bekerja sebagai nelayan.

## Kesimpulan Dan Rekomendasi

Hingga kini, belum ada model yang tepat dalam menangani permukiman kumuh, penataan permukiman kehilangan pendekatan sosial serta analisis yang mendalam tentang situasi riil masyarakat. Sebelum memindahkan masyarakat kumuh ke permukiman baru, sebaiknya masyarakat diberikan pengetahuan dan diperbaiki dahulu kualitas hidupnya.

Banyak sekali aktor yang ikut dalam penataan permukiman kumuh, mulai dari internasional sampai tingkat lokal, tetapi di sisi lain, mungkin saja terlalu banyak aktor bisa menyebabkan terjadi kesulitan untuk berkoordinasi antar mereka, sehingga tujuan penataan sulit tercapai. Ada baiknya untuk mengurangi aktor yang memang tidak aktif membantu penataan.

Akhirnya, dibandingkan dengan aktor-aktor internasional dan peran pemerintah, justru masyarakatlah yang merupakan aktor utama yang justru harus dirangkul dalam penataan permukiman kumuh

## Daftar pustaka

- Dokumen Rencana Detil Tata Ruang Kota Bandar Lampung. 2005. Pemerintah Kota Bandar Lampung. Lampung.
- Despa, D., Nama, G. F., Septiana, T., & Saputra, M. B. (2021). Audit Energi Listrik Berbasis Hasil Pengukuran Dan Monitoring Besar Listrik Pada Gedung A Fakultas Teknik Unila. *Electrician*, 15(1), 33-38.
- Herbasuki. 1984. Proses, Perkembangan dan Permasalahan Kampung kota, Kliping dari berbagai sumber. Jakarta.
- Kessides, C. 1997. *World Bank Experience with the Provision of Infrastructure Services for the Urban Poor*. Washington, DC: World Bank.
- Nawagamuwa, Arawinda, et. Al. 2003. *Slum, Squatter Areas and Informal Settlement*, 9th International Conference. Srilanka.
- Nama, G. F., Pamungkas, A. D., Mardiana, M., & Septama, H. D. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Game Edukasi Koleksi Permainan Aksara Lampung (Koper Apung) Berbasis Android Menggunakan Metode Scrum. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 6(4), 420-429.
- Specter, Michael. 1984. *A Sprawling, Thirsty Giant, The Little Colonial Town Of Jakarta becomes A Megalopolis*.

Vol. 123, No. 13.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor  
327/KPTS/M/2002

Sulistiono, W. E., Muhammad, M. A., Andrian, R., Nama, G. F.,  
Rezaldhy, S. G., Annisa, R., ... & Djausal, A. N. (2021,  
October). Virtual Reality as Learning Media for  
Lampung Historical Heritage. In 2021 International  
Conference on Converging Technology in Electrical  
and Information Engineering (ICCTEIE) (pp. 14-18).  
IEEE.